

**PENGARUH KUALITAS DIPA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH DAN SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA  
TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN**  
*(Studi empiris pada SKPD di Kota Padang)*

**ARTIKEL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



**IRMA ALDINA**

**Nim 2012 / 1202564**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL**

**PENGARUH KUALITAS DIPA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH DAN SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA  
TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN  
( Studi empiris pada SKPD di Kota Padang)**

Oleh :

**IRMA ALDINA**  
**1202564/2012**

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode September 2016 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, juni 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc Ak**  
**NIP. 19730213 199903 1003**

Pembimbing II



**Vita Fitria Sari SE, M.Si**  
**NIP. 19870515 201012 2 009**

**PENGARUH KUALITAS DIPA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH DAN SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA  
TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN**

*(Studi empiris pada SKPD di Kota Padang)*

Irma Aldina

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email: [aldinairma@gmail.com](mailto:aldinairma@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kualitas DIPA, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di kota Padang yang berjumlah 39 SKPD, teknik pengambilan sampel secara total sampling. Responden penelitian adalah kepala SKPD dan 3 staff bagian keuangan SKPD. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.0 for Windows. Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) Kualitas DIPA berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran dengan nilai (sig 0.000) (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran nilai (sig 0.001) 3) Sistem Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran dengan nilai sig 0.418. Dalam penelitian ini disarankan: 1) Bagi instansi pemerintah, untuk dapat meningkatkan tingkat penyerapan anggaran maka setiap manajer pada SKPD hendaknya dapat berkontribusi aktif dalam menjalankan kualitas DIPA, SPIP dan Sistem anggaran berbasis kinerja yang lebih baik. 2) Untuk peneliti berikutnya yang tertarik meneliti judul yang sama sebaiknya menambahkan variabel lain.

**Kata Kunci** : Tingkat Penyerapan Anggaran, Kualitas Dipa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja.

**ABSTRACT**

*This study examine the effect of variable Quality of Dipa or DPA, Government internal control system and of Performance Based Budgeting System toward Budget Absorption Rate. The type of this study is a causative research. The population of this research is all the SKPD on Padang with total 39 SKPD. Sampling method used was total sampling. To test this hypothesis the author uses primary data by spreading the questionnaire, which was distributed directly to the Unit (SKPD) Padang. Data analysis techniques using multiple regression test. The results showed that: 1) Quality of Dipa or DPA affect Budget Absorption Rate with a level of (sig 0.000 ). 2) Government internal control system affect Budget Absorption Rate with a level of (sig 0.001). 3). Performance-Based Budgeting System not affect Budget Absorption Rate with a level of ( sig 0.418). In this study suggested: 1) For the government, to be increase Budget Absorption Rate the use of Quality of Dipa or DPA, goverment internal control system and Performance Based Budgeting System 2) For the next researchers who are interested in researching the same title should add another variable.*

**Keywords:** Budget Absorption Rate, Quality Of Dipa, Government Internal Control

## **I. PENDAHULUAN**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Oleh sebab itu, penganggaran dalam sektor publik harus memperhatikan efektif, efisien dan ekonomis sehingga dana anggaran yang dibuat pada akhirnya tidak menggagalkan anggaran yang telah disusun. Apabila total penyerapan anggaran masih rendah hal ini menunjukkan indikasi belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan kontribusi pada pendapatan domestik bruto.

Pemerintah telah mengeluarkan 3 (tiga) paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan adanya 3 (tiga) paket perundang-undangan tersebut telah memberikan implikasi pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi, yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur.

Menurut Halim (2014:104) Penyerapan anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Secara umum penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu.

Apabila terjadi kegagalan target penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara

dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Carlin 2014).

Menurut Supriyo (22:2015) dalam RPA semester 1 tahun 2015 kanwil DJPB Provinsi Sumbar menyatakan target tingkat serapan anggaran adalah 40% untuk triwulan 1, 60% pada semester 1 ( triwulan III) dan 90% pada Semester 2 ( triwulan IV). Jika penyerapan anggaran tidak mencapai target sangat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi. Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran akan di fokuskan berdasarkan kualitas dipa, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem anggaran berbasis kinerja.

DIPA atau DPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dan hasil dari perencanaan anggaran yang tertuang dalam RKA-KL(Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga). Apabila perencanaan anggaran yang tidak matang akan berdampak terhadap kualitas perencanaan anggaran yang buruk dan menyebabkan anggaran yang tertuang dalam DIPA atau DPA harus direvisi kembali. Berbagai penelitian telah menguji hubungan kualitas dipa dengan tingkat penyerapan anggaran diantaranya penelitian Seftianova (2013) hasil penelitian menunjukkan kualitas dipa berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran, karena kualitas dipa yang baik akan mendukung kelancaran serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran dapat lebih berkualitas. Pada penelitian Emkhad(2012) hasil penelitian menunjukkan faktor kapasitas SDM, regulasi,

lambatnya pengesahan anggaran tahun lalu berpengaruh terhadap minimnya penyerapan anggaran sedangkan kualitas dipa tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan tentang suatu sistem yang menyelenggarakan kegiatan pengendalian pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif serta efisien dalam pengelolaan keuangan negara dan dana anggaran. Ada beberapa penelitian telah menguji hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap tingkat penyerapan anggaran diantaranya penelitian Hindriani,dkk (2012) dan Metyani,dkk (2015) hasil kedua peneliti tersebut menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran karena jika penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berjalan dengan baik maka kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran daerah akan akuntabel dan transparan, begitu juga sebaliknya apabila penerapan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan penyimpangan anggaran daerah. Namun pada penelitian Muhrom,dkk (2015) hasil penelitian menunjukkan kapasitas SDM, pengembangan capaian sistem pelaporan capaian kinerja, dan pelayanan administrasi yang berpengaruh terhadap optimalisasi penyerapan anggaran rangka pencapaian kinerja organisasi sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap optimalisasi penyerapan anggaran.

Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (*outputs*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Pada penerapan penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin dalam dokumen anggaran (RKA), secara substansi RKA menyatakan informasi

kebijakan beserta dampak alokasi anggarannya (Ismail,dkk,2009 dalam Decky,2014). Senada dengan penelitian Sem (2012) dan Ratna (2013) yang meneliti hubungan antara sistem anggaran berbasis kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran dan hasil kedua penelitian menunjukkan sistem anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran karena sistem anggaran berbasis kinerja akan mempermudah pemantauan terhadap program untuk melihat seberapa baik pemerintah telah mencapai outcome yang dijanjikan dan diinginkan. Pada penelitian Adelstin (2015) hasil penelitian menunjukkan deskriptif dan kendala-kendala berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran sedangkan sistem anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan anggaran.

Berdasarkan data yang ditemukan pada [www.dpka.padang.go.id](http://www.dpka.padang.go.id) dapat menggambarkan rata-rata tingkat penyerapan anggaran dalam lima tahun terakhir dalam bentuk penyerapan anggaran per semester dari laporan realiasi anggaran pada seluruh Satuan kerja perangkat daerah di Kota Padang selalu turun naik, hal ini dibuktikan pada tahun 2011 setelah perubahan anggaran rata-rata serapan anggaran sebesar 80% sudah mendekati target serapan anggaran sebesar 90% untuk semester 2 pada tahun anggaran sedangkan tahun 2012 setelah perubahan masuk kategori kurang baik karena rata-rata serapan anggaran sebesar 69% kurang dari 90% maka serapan anggaran pada skpd ini belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2013 serapan anggaran setelah perubahan anggaran meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 95% maka serapan anggaran lebihin target 90% untuk semester 2 tahun anggaran. Pada tahun 2014 serapan anggaran setelah perubahan anggaran pada skpd sebesar 79% masuk kategori baik karena sudah mendekati 90% tahun anggaran. Serapan anggaran tahun 2015 sebelum perubahan anggaran sebesar 35% masuk kategori kurang baik karena pada target serapan anggarannya 60% pada tahun semester 1 sedangkan semester 2 setelah perubahan anggaran serapan anggaran sebesar 80% maka sudah mendekati 90% target anggaran maka hal

ini membuktikan pada SKPD di Kota Padang penyerapan anggaran masih kurang mencapai target yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang tidak cukup oleh pelaksanaan anggaran dan syarat-syarat yang harus di penuhi. Selain itu adanya pola pengeluaran negara menunjukkan tren yang relatif sama setiap tahunnya, yaitu mulai meningkat pada pertengahan tahun dan puncaknya pada akhir tahun sedangkan awal tahun meningkat secara lambat dan hampir tidak mencapai target. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran yang kurang bagus akan berdampak terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan dimana tidak berjalannya fungsi kebijakan fiskal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara efektif dan hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi terlambatnya pelaksanaan program pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran sangat tidak sehat bagi manajemen kas pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran sehingga peneliti merasa perlu menguji ulang variable ini kembali dengan sampel dan periode yang berbeda. Sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan anggaran tahun berikutnya dan menilai kinerja pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah dalam mengelola dana anggaran daerah. Peneliti menggunakan periode yang terbaru yaitu 2015 dengan sampel dan responden pada SKPD di kota padang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian peneliti juga menggunakan indikator penyerapan anggaran yang di adopsi Shenny (2012) berbeda dengan Emkhad (2012) yang indikatornya *Cash Flow Forecasting System* (CFFS). Objek penelitian yang digunakan difokuskan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan alasan SKPD merupakan suatu perangkat kerja pemerintah yang mengelolah keuangan negara dan dana anggaran yang telah di buat oleh pemerintah dalam periode tertentu. Selain itu, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyediakan jumlah sampel yang lebih

besar, yang diharapkan mampu menghasilkan tingkat generalisasi yang lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :” **Pengaruh Kualitas DIPA, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (studi empiris pada SKPD di Kota Padang)**”.

## II. LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 1. Teori *Stakeholder*

Pengertian *stakeholder* menurut Freeman dan Reed dalam Carlin (2014) adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian tertentu. Para pemegang saham, para supplier, bank, para *customer*, pemerintah dan komunitas memegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai *stakeholder*).

Pemerintahan merupakan bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan para *stakeholder* yang berarti pemerintah harus melaksanakan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun *stakeholder* lainnya dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari *stakeholder* akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemerintah sebagai *stakeholder* yang memiliki peran penting dalam proses memajukan suatu daerah, pemerintah diharapkan mampu untuk melakukan upaya pembangunan secara maksimal. Kemajuan suatu daerah dilihat dari bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu daerah harus mampu mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat didaerahnya.

Kepentingan rakyat yang dimaksudkan disini adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan

tersebut memang merupakan representasi dari apa yang diinginkan oleh rakyat sehingga hasilnya akan kembali kepada rakyat itu juga nantinya. Pelayanan, Strategi, dan Operasi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut menjadi tanggung jawab bersama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai *stakeholder* pemerintah daerah. Hal tersebut dapat tercermin dalam proses penggunaan anggaran yang efektif dan efisien sehingga tidak menyebabkan penyerapan realisasi yang rendah.

## 2. Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (84:2014), penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002 (Kuncoro, 2013).

Menurut Mardiasmo (2009:61) Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian

target anggaran dan berapa besar yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

Proses penyerapan APBN adalah proses dimana kegiatan-kegiatan yang telah dirinci dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA masing-masing Satuan Kerja dilaksanakan, dan pembayarannya dilakukan kepada yang berhak, atau dengan kata lain telah terjadi pengeluaran negara. Pengeluaran negara sendiri dapat diartikan sebagai uang yang keluar dari kas negara (Kementerian Keuangan, 2011b : 69 dalam Mashudi, 2013).

Menurut Lubis (1997:3) dalam Shenny (2012), mengatakan efektivitas penyerapan anggaran lebih menekankan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

### a. Tepat

Tepat artinya apa yang dikehendaki tercapai kena sasaran memenuhi target, apa yang diinginkan menjadi realitas. Selain itu, kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas / pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan / ditetapkan sebelumnya. Sehingga tidak ditemui adanya tugas / pekerjaan yang masih terlambat penyelesaiannya. Tepat disini lebih menekankan pada memenuhi target dan rencana yang terwujud.

### b. Cepat

Cepat artinya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan. Lebih menekankan pada pekerjaan selesai sebelum waktu yang ditetapkan dan pekerjaan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

### c. Hemat

Hemat artinya tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apapun dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih menekankan pada tidak terjadi pemborosan dan pengalokasian anggaran sebanding dengan hasil (output) yang dirasakan oleh pengguna anggaran.

### d. Selamat

Selamat artinya tanpa mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian tujuan.

Lebih menekankan pada tidak adanya kendala atau hambatan yang dialami dalam penyusunan anggaran.

Menurut Muhrom (2015) menyatakan bahwafaktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut antara lain:

- ❖ Adanya revisi dalam DIPA karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan
- ❖ Adanya keterlambatan penerimaan petunjuk teknis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan
- ❖ Adanya keterlambatan penetapan PPK dan pelaksana kegiatan
- ❖ Adanya perubahan peraturan yang menyebabkan perbedaan persyaratan pencairan.
- ❖ Adanya pengunduran jadwal pengadaan barang dan jasa.
- ❖ Adanya rekanan yang tidak mengambil uang muka atau termin pembayaran.
- ❖ Adanya jadwal pengadaan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

### **3.Kualitas DIPA**

Pengelolaan keuangan daerah harus menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai fungsi, program, kegiatan dalam mencapai sasaran dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 171/PMK.02/2013).

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi

pemerintah (KPRI No.72 tahun 2004 dalam palata,2011).

Menurut Siswanto (2010) DIPA atau DPA merupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran atau RKA-KL yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut.

DPA atau DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011) yang berisi data dan uraian seluruh kegiatan yang akan dilakukan beserta alokasi anggarannya, dan merupakan dasar bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pertimbangan pertimbangan lanjutan terhadap DIPA (misalnya perubahan program, perubahan jenis belanja, dan lain-lain), maka DIPA tersebut bisa direvisi. Dasar hukum revisi DIPA adalah Peraturan Menteri Keuangan, dan petunjuk teknis atas revisi DIPA dalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang berbeda-beda untuk tiap-tiap tahun anggaran (Mashudi,2013).

DIPAA atau DPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA atau DPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Menurut Seftianova (2013) menyatakan kualitas DIPA atau DPA berkaitan erat dengan



perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut dengan memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Ketepatan waktu dalam menerima DIPA.

Dengan langkah-langkah ketepatan waktu dalam menerima daftar isian pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah diterimanya SP RKAKL.
- b. Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun jadwal validasi DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama Kementerian Negara / Lembaga.
- c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama memerintahkan para KPA satker agar menyampaikan DIPA atau DPA dan ADK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan.
- d. Direktur Jenderal Perbendaharaan memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyusun jadwal validasi DIPA dan disampaikan kepada KPA satker di wilayah kerjanya.
- e. Petugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima DIPA dan ADK satker, selanjutnya melakukan validasi dengan mencocokkan DIPA dengan ADK satker dan mencocokkan ADK dengan data Keppres mengenai rincian APBN yang terdapat dalam database RKAKL-DIPA.

2. Tidak adanya kesalahan dalam DIPA.

Setelah DIPA disahkan dan diterima oleh KPA, KPA berkewajiban melakukan pemeriksaan kembali terhadap DIPA untuk memastikan bahwa DIPA yang diterima telah sesuai dengan SP RKAK/L dan tidak terdapat kesalahan-kesalahan, baik yang bersifat administratif maupun substantif. Penelitian

dimaksud meliputi antara lain kode dan nomenklatur satker, pejabat perbendaharaan, kode kantor bayar, kode kewenangan, kode lokasi, sumber dana, jenis belanja, cara penarikan, jumlah pagu anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan jumlah anggaran yang diblokir.

Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan, maka segera disampaikan kepada Kantor Pusat/Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dilakukan revisi/penyesuaian seperlunya sesuai kewenangan. Hal tersebut perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatannya, satker tidak mengalami hambatan sehingga penyerapan anggaran dapat dimulai secepatnya sejak awal tahun anggaran.

3. Tidak diperlukannya revisi DIPA

Revisi DIPA yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan pergeseran rincian anggaran pada DIPA tahun berjalan. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan pagu, perubahan kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun dan informasi lain dalam format DIPA. Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2014.

Sesuai standar pelayanan penyelesaian revisi anggaran Non APBN-Ppada DJA, yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-28/AG/2014, jangka waktu penyelesaian usulan revisi ditetapkan 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap (untuk usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan). Namun demikian, penyelesaian revisi DIPA ini tidak memperhitungkan revisi yang diakibatkan adanya kebijakan pemotongan APBN. Hal tersebut disebabkan persetujuan dari DPR yang serta lama diterima DJA, penyusunan konsep nota dinas yang cukup memakan waktu (mencantumkan alasan pemotongan), masih adanya perbedaan persepsi antar kanwil DJPB dalam menyikapi revisi DIPA yang diakibatkan pemotongan anggaran dan revisi DIPA dilakukan karena tidak sesuai dengan kebutuhan.

4. Tidak adanya tanda bintang

Apabila DIPA perlu revisi kerana tidak sesuai dengan kebutuhan maka anggaran kegiatan diblokir/ tanda bintang karena belum

ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPRD hal akan membuat dana anggaran tidak dapat di cairkan maka lebih baik tidak ada tanda bintang dalam DIPAmaka sangat perlu untuk tidak ada tanda bintang di dokumen perencanaan atau DIPA pada satker.

#### **4.Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Sistem pengendalian intern pemerintah bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan dapat dicapai apabila seluruh pimpinan dan staf-staf di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian pada keseluruhan kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Menurut Moeller (2007:4) menyampaikan pendapat bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Anggaran yang berkualitas saja belum tentu menjamin keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan apabila suatu rencana mempunyai kemungkinan kecil untuk berhasil jika tidak dilakukan pengendalian. Dalam hal ini terdapat tiga aspek utama yang dapat mendukung keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam anggaran yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo : 2009 dalam edisah,2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam Gustika (2013) mengidentifikasi unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi:

##### **a. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

##### **b. Penilaian Risiko**

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.

Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

##### **c. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan pada kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas serta fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah dibawah ini :

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
2. Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
4. Pengendalian fisik atas aset.
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
6. Pemisahan fungsi.
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai nilai informasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan revidu lainnya.

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh

yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

### 5. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

#### *Performance Based Budgeting*

(Penganggaran Berbasis Kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada „*output*“ organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana strategis organisasi sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan (Haryanto, dkk, 2007:74).

Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolakukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan program anggaran dimulai dengan perumusan dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut (Bastian, 2006).

Prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya (Sancoko, dkk, 2008).

Anggaran berbasis kinerja memiliki prinsip yang mana menurut Halim (2007: 178) dalam Decky (2014) prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang

dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan / proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya.

### 3. Keadilan anggaran

Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan pemerintah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

### 4. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan *stakeholders*.

### 5. Disusun dengan pendekatan kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau *input* yang telah ditetapkan.

## Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang dilakukan Seftianova (2013) dan Masmudi (2013) hasil penelitian menunjukkan kualitas dipa berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran, karena kualitas dipa yang baik akan mendukung kelancaran serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran dapat lebih berkualitas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Hindriani,dkk (2012) Anggelina (2013), Nur,dkk (2014) dan Metyani,dkk (2015) hasil peneliti tersebut menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran

karena jika penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berjalan dengan baik maka kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran daerah akan akuntabel dan transparan, begitu juga sebaliknya apabila penerapan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan penyimpangan anggaran daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna (2013), Venni (2013) dan Komang,dkk (2014) yang menemukan pengaruh signifikan antara sistem anggaran berbasis kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran, karena sistem anggaran berbasis kinerja dalam anggaran akan mempermudah pemantauan terhadap program untuk melihat seberapa baik pemerintah telah mencapai outcome yang dijanjikan dan diinginkan oleh pemerintah.

## Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu tingkat penyerapan anggaran sebagai variabel dependen dan kualitas DIPA, Sistem pengendalian internal pemerintah dan Sistem Anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen.

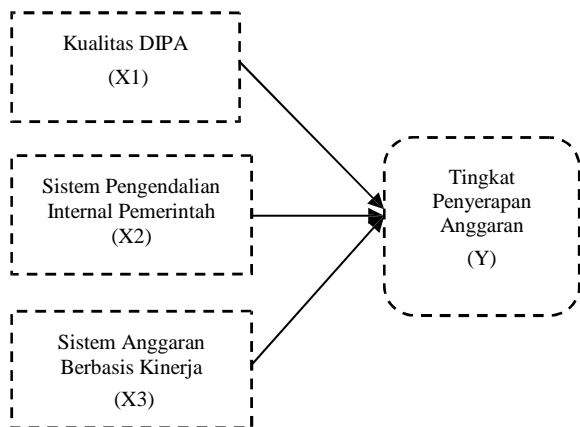
Salah satu kriteria tingkat penyerapan anggaran yang harus di penuhi yaitu salah satunya kualitas dipa karena jika daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA atau DPA di rencana dengan matang dan tidak banyak revisinya maka sangat berguna untuk pengambil keputusan dalam pencairan dana yang akan diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan RENJA dan RKA pada setiap satuan kerja pemerintah.

Dalam meningkatkan penyerapan anggaran supaya mencapai target serapan anggaran pemerintah maka sangat di perlukan sistem pengendalian internal pemerintah karena dengan adanya sistem pengendalian internal dalam pemerintah sangat bermanfaat untuk

mengendalikan semua kegiatan atau program yang di laksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan sistem ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan yang harus dilakukan dengan tepat waktu dan mengatasi resiko dalam penyelewengan dana anggaran yang akan terjadi kedepannya.

Pemerintah harus berperan aktif dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja karena sistem ini berguna untuk menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan negara terutama dana anggaran dan menjadikan dasar atas penilaian kepada kinerja pemerintah dalam satu periode tahun anggaran.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar: (Gambar 1).



### Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka dapat uraikan hipotesis berikut :

H1: Kualitas DIPA berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

H2: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

H3: Sistem Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

### III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari [www.padang.go.id](http://www.padang.go.id) Pemerintah Kota Padang jumlah Satuan Kerja yang terdapat berjumlah 39 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di kota Padang.

Penelitian ini menggunakan metode total sampling dengan 156 subjek. Responden pada penelitian ini kepala SKPD atau pemimpin dan 3 staf atau karyawan yang memahami dan melaksanakan fungsi pengelolaan dana anggaran APBD pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Responden yang memiliki jabatan sebagai kuasa pembinaan atau pelaksanaan anggaran (KPA), penggunaan anggaran atau kasi anggaran (PA), kasubag keuangan /PPA, pejabat pembuat komitmen (PPK), pembantu PPK, pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PP SPM), bendahara pengeluaran atau karyawan.

#### 1. Uji Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan corrected item total correlation. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka data dikatakan valid. Berdasarkan hasil pengelolaan data didapatkan bahwa  $r_{tabel}$  nilai corrected item-total correlation untuk masing-masing item variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $Y$  semuanya diatas  $r_{tabel}$ . Dimana  $r_{hitung} > r_{tabel}$  adalah  $r_{tabel}$  variabel  $Y$  sebesar 0,162 sedangkan  $r_{tabel}$  variabel  $X_1$  sebesar 0,163, variabel  $X_2$  sebesar 0,169 dan variabel  $X_3$  sebesar 0,166 Jadi kesimpulannya semua variabelnya adalah valid. (tabel 4.7)

## b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Untuk uji reabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima dan lebih dari 0,8 adalah baik. Keandalan koensistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel yaitu tingkat penyerapan anggaran sebesar 0,668, sedangkan kualitas dipa sebesar 0,838, sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,910 dan sistem anggaran berbasis kinerja sebesar 0,900. Jadi kesimpulannya bahwa semua variabel diatas adalah reliabel karena angka hasil olahan spss menyatakan bahwa setiap item yang dalam variabel Y, X1, X2 dan X3 > dari 0,6 dan variabel ini dinyatakan bisa diterima. (tabel 4.8).

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi pada penelitian ini agar parameter tidak bias yaitu sebagai berikut:

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai  $Sig \geq 0,05$  maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai  $Sig < 0,05$  maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau indepenen. Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value (Ghozali, 2007). Batas dari tolerance value adalah  $> 0,10$  atau nilai  $VIF < 10$ . (tabel 4.10)

## c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *glejser*. Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel bebas  $\geq 0,05$  yang berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

## 3. Metode Analisis Data

### a. Analisis Regresi Berganda

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Kualitas DIPA (X1), SPIP (X2), dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (X3) terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Y). Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dalam hal ini adalah :

$\alpha_0$  = Konstanta

X1 = Kualitas DIPA atau DPA

X2 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

X3 = Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (SABK)

Y = Tingkat Penyerapan Anggaran

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien regresi untuk X1, X2, X3  
 $e$  = error term

### b. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika  $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$  dan  $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$ , berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau  $(\alpha) = 5\%$  (0.05).

### c. Uji koefisien determinasi disesuaikan (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. *Adjusted R Square* berarti *R Square* sudah disesuaikan dengan derajat masing-

masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan *Adjusted R Square*. nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

### Uji Hipotesis (T-Test)

Uji statistik *t* pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha$ ), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau ( $\alpha$ ) = 0.05 (5%). Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika tingkat signifikansi  $< \alpha$  0,05 dan koefisien regresi ( $\beta$ ) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak  $H_0$  pada pengujian hipotesis 1,2,3 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima  $H_1$ ,  $H_2$  dan  $H_3$ .
- 2) Jika tingkat signifikansi  $< 0,05$  dan koefisien regresi ( $\beta$ ) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima Hipotesis.
- 3) Jika tingkat signifikansi  $> \alpha$  0,05 dan koefisien regresi ( $\beta$ ) positif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

### 4. Definisi Operasional

Berikut ini adalah definisi operasional variabel-variabel penelitian yang digunakan:

#### a. Tingkat penyerapan anggaran

Tingkat penyerapan anggaran adalah suatu estimasi pada realisasi anggaran dalam mencapai target pemerintah daerah dalam mewujudkan dan penilaian kinerja pemerintah daerah yang

akuntabilitas dan transparansi dalam satu periode tahun anggaran.

#### b. Kualitas DIPA

Kualitas DIPA yaitu suatu dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam pencairan dana pada waktu yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak memiliki tanda bintang atau blokir pada pencairan dana atas kegiatan atau program pemerintah. Apabila pencairan dana anggaran dan penarikan dana yang rendah ini dibiarkan terjadi berlarut-larut maka akan mendorong terjadinya masalah penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun dimana satker berupaya mencairkan seluruh pagu dana yang tercantum dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang bisa digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

#### c. Sistem pengendalian internal pemerintah

SPIP yaitu suatu sistem pengendalian internal pemerintah yang dilakukan pada suatu kegiatan oleh pemimpin dan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun dan penyelewengan dana anggaran untuk kepentingan pribadi.

#### d. Sistem anggaran berbasis kinerja

Sistem anggaran berbasis kinerja yaitu suatu tolok ukur pada kinerja pemerintah dalam melaksanakan visi, misi, rencana anggaran untuk mencapai output yang diharapkan pemerintah daerah/ kota dalam mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparansi dalam pengelolaan keuangan terutama dana anggaran yang satuan periode anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah populasi penelitian ini adalah 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Padang yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, kecamatan dan Inspektorat Daerah. Responden pada penelitian ini yaitu kepala SKPD dan kepala bagian keuangan SKPD, jumlah responden adalah 156 orang.

Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 151 responden, dan kuesioner yang dapat diolah adalah 151. Tahap pengumpulan data dilakukan lebih kurang 1 bulan dengan cara membagikan kuisisioner pada seminggu pertama dan membuat janji atau kesepakatan untuk pengambilan kuisisioner pada seminggu berikutnya setelah kuisisioner diberikan atau diantarkan kepada responden.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui karakteristik responden 39 pada SKPD di Kota Padang yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Berdasarkan data yang diisi oleh responden pada kuesioner penelitian, diketahui karakteristik responden yang disajikan secara umum menurut jabatan, jenis kelamin, jenjang pendidikan, lama bekerja dan bidang pendidikan.

## A. HASIL PENELITIAN

### 1 Teknik Analisis Data

#### a. Analisis Regresi Berganda

Hasil pengelolaan data yang menjadi dasar dalam pembentukan modal penelitian ini pada tabel 4.19 sebagai berikut:

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji T Statistiks**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.536	3.168		1.747	.083
	kualitas dipa	.194	.045	.320	4.312	.000
	sistem pengendalian internal pemerintah	.131	.040	.320	3.245	.001
	sistem anggaran berbasis kinerja	.047	.058	.081	.812	.418

a. Dependent Variable: tingkat penyerapan anggaran

Berdasarkan hasil uji regresi terlihat bahwa variabel independen menunjukkan hubungan signifikan terhadap variabel dependennya (Tingkat penyerapan anggaran). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi kualitas dipa

berpengaruh signifikan sebesar 0,000 ( $\text{sig} < 0,05$ ) dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan sebesar 0,001 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Sementara untuk sistem anggaran berbasis kinerja masing-masing 0,418 ( $\text{sig} > 0,05$ ) ini berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran.

#### b. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara bersama variabel independen maupun menjelaskan variabel dependen secara keseluruhan atau secara simultan. Dimana yang digunakan dalam pengujian adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikan pada level  $\alpha = 0.05$  dapat dilihat dari tabel 4.17. Hasil uji pada tabel 4.18 diperoleh nilai  $F = 13,089$  dengan nilai signifikansi sebesar  $P \text{ value} = 0,000$  yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan ketiga variabel mampu menjelaskan tingkat penyerapan anggaran pada SKPD di pemerintah di Kota Padang.

#### c. Uji koefisien Determinasi Disesuaikan (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependent amat terbatas.

Berdasarkan hasil pengujian model summary menunjukkan besarnya pengaruh secara bersama-sama ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi ( $\text{Adj } R^2$ ) sebesar 0,195 atau 19,5%. Artinya kualitas dipa, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem anggaran berbasis kinerja mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran sebesar 19,5%, sedangkan sisanya sebesar 80,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini pada tabel 4.18.

#### Uji T Statistik

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi secara parsial dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.



Hipotesis diterima bila tingkat signifikansi ( $\alpha \leq 0,05$ ) dan koefisien regresi ( $\beta$ ) positif. Pengujian hipotesis secara persial dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $t_{hitung}$  Dengan nilai  $t_{tabel}$ . Hal pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat  $\alpha$  0,05 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dan  $t_{tabel}$ . Hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha(0,05)$ . Nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha$  (0,05) adalah 1,97623. Pada tabel dapat dilihat bahwa variabel kualitas dipa memiliki nilai signifikansi 0,000 ( $sig < 0,05$ ) nilai  $t$  hitung (positif) 4.312 > 1.97623. Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel kualitas dipabernilai positif sebesar 0,194. Dapat disimpulkan bahwa kualitas dipaberpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sehingga **hipotesis pertama penelitian ini diterima**
2. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dan  $t_{tabel}$ . Hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha(0,05)$ . Nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha$  (0,05) adalah 1,97623. Pada tabel dapat dilihat bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai signifikan 0,001 ( $sig < 0,05$ ) nilai  $t$  hitung (positif) 3.245 > 1,97623 dan nilai koefisien  $\beta$  dari variabel sistem pengendalian internal pemerintah bernilai positif sebesar 0,131. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sehingga **hipotesis kedua penelitian ini diterima**
3. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dan  $t_{tabel}$ . Hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha(0,05)$ . Nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha$  (0,05) adalah 1,97623. Pada tabel dapat dilihat bahwa variabel sistem anggaran berbasis kinerja memiliki nilai signifikan 0,418 ( $sig > 0,05$ ) nilai  $t$  hitung 0,812 < 1,97623 dan nilai koefisien  $\beta$  dari variabel sistem anggaran berbasis kinerja bernilai positif sebesar

0,047. Dapat disimpulkan bahwa sistem anggaran berbasis kinerja (X3) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sehingga **hipotesis ketiga penelitian ini ditolak.**

## B. PEMBAHASAN

### a. Kualitas DIPA berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa kualitas dipa berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran artinya apabila dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran dibuat dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan, hal ini dilakukan agar dalam melaksanakan kebijakan anggaran pada organisasi atau instansi pemerintah dapat menggunakan anggaran yang sudah direncanakan dengan baik dan melaksanakan program pemerintah dengan tepat pada sasaran.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa kualitas dipa berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$  dan koefisien  $\beta$  yaitu sebesar 0,194. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Seftianova (2013) yang menyatakan bahwa kualitas dipa atau dpa berpengaruh dan positif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran antar periode, karena kualitas dipa atau dpa yang baik akan mendukung kelancaran serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran dapat lebih berkualitas. Selain itu hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini di dukung dengan oleh penelitian Mashudi (2013) yang telah membuktikan bahwa faktor dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran atau disebut dipa atau dpa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran dengan menghasilkan indikator-indikator dipa atau dpa sebesar 29% dengan persentase ini dapat membuktikan tingkat penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh dipa atau dpa. Dimana dipa atau dpa merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kemudian disahkan oleh

Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berisi data dan uraian seluruh kegiatan yang akan dilakukan beserta alokasi anggarannya, serta dasar untuk melakukan tindakan dalam pengeluaran negara. Oleh karena itu kualitas dipa yang baik akan mendukung kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran dapat lebih ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil nilai TCR kualitas dipa termasuk kategori cukup baik yang hanya menunjukkan angka 53%. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya revisi dipa atau dpa sesuai dengan kebutuhan maka serapan anggaran akan meningkat dan menghindari penyelewengan pencairan dana anggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan pemerintah. Hasil pengujian secara parsial pada tabel 4.20 didapati kualitas DIPA berpengaruh hanya sebesar 19,4% terhadap tingkat penyerapan anggaran sehingga memungkinkan adanya kualitas dipa berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kemudian disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan dalam pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Jadi kualitas dipa dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada pemerintah dalam bentuk perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga memberikan kepuasan kepada *stakeholders*. Sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* kepada pemerintah akan dana yang dikelola untuk kepentingan masyarakat umum.

Implikasi yang dapat disimpulkan atas penerimaan hipotesis yang diajukan adalah kualitas dipa atau dpa (dokumen pelaksanaan anggaran) harus dibuat sesuai dengan kebutuhan, tepat waktu dan tidak banyak melakukan revisi dokumen pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran karena untuk

mengalokasikan pencairan dana anggaran harus terlaksana dengan efektif, efisien dan ekonomis. DIPA juga dapat digunakan sebagai pengendalian dan pengawasan pada setiap kegiatan atau program dan kebijakan dalam pencairan dana anggaran oleh pemerintah akan digunakan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat dan menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat serta menunjukkan kinerja pemerintah yang bagus dalam mewujudkan visi dan misinya dalam bentuk serapan anggaran yang terus meningkat dan mencapai target serapan tahun berjalan dan pertahun atau tahun anggaran berikutnya.

#### **b. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran**

Hasil penelitian kedua ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran artinya sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tingkat penyerapan anggaran yang berkualitas karena dengan adanya suatu sistem yang mengendalikan kegiatan atau program dan kebijakan pemerintah yang menggunakan dana anggaran bisa terlaksana dengan efektif dan efisien serta terkendali.

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima dan disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0.001 < 0.05$  dan koefisien  $\beta$  yaitu sebesar 0,131. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hindriani,dkk (2012) yang menyatakan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan anggaran dan penelitian Metyani,dkk (2015) menyatakan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Karena sistem pengendalian internal pemerintah merupakan solusi untuk mengendalikan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari terjadi penyelewengan dana anggaran untuk kepentingan pribadi. Apabila semakin baik dan

efektif pengendalian intern yang dilaksanakan maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik dan serapan anggaran akan meningkat serta mencapai target setiap tahun.

Berdasarkan nilai TCR sistem pengendalian internal pemerintah termasuk kategori baik yang hanya menunjukkan angka 86%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada SKPD akan mengatasi resiko dari penyelewengan dana anggaran dan bisa meningkatkan serapan anggaran pada periode berikutnya. Hasil dari pengujian secara parsial pada tabel 4.20 didapati sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh sebesar 13,1% terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hal ini cukup bagus dan memungkinkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Secara teoretis, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Sistem pengendalian internal pemerintah bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan dapat dicapai apabila seluruh pimpinan dan staf-staf di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian pada keseluruhan kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif dan efisien akan mempengaruhi serapan anggaran pada instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *teori stakeholder*, dimana pemerintah terus berupaya untuk mencari dukungan dari pada *stakeholder* untuk memenuhi kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pemerintah sebagai *stakeholder* yang memiliki peran penting dalam proses memajukan suatu daerah, pemerintah mampu untuk melakukan upaya pembangunan secara maksimal. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari cara mengelola anggaran yang secara efektif dan efisien.

Implikasi yang dapat disimpulkan atas penerimaan hipotesis yang diajukan adalah sistem pengendalian internal pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif dan sungguh-sungguh dalam mengendalikan kegiatan program dan kebijakan yang diambil dalam merencanakan

dana anggaran yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat serta menunjukkan kinerja pemerintah yang bagus dalam mewujudkan visi dan misinya.

### **c. Sistem anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran**

Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa sistem anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran tetapi berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara sistem anggaran berbasis kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran artinya sistem anggaran berbasis kinerja sangat mendukung pengalokasian dana anggaran kepada program yang hasil atau outcome yang didapatkan dirasakan oleh rakyat dalam pencapaian serapan anggaran yang di harapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak dan disimpulkan bahwa sistem anggaran berbasis kinerja tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0.418 > 0.05$  dan koefisien  $\beta$  yaitu sebesar 0,047. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taufik (2013) dan Adelstin (2015) yang menyatakan bahwa sistem anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran karena apabila dikaitkan dengan persyaratan penerapan *performance based budgeting* yaitu klasifikasi pengeluaran ditetapkan berdasarkan program (*program based*) artinya rincian belanja dalam suatu program atau kegiatan hanya bersifat informasi saja dan tidak mengikat sehingga pelaksanaan belanja menjadi lebih fleksibel dan pengguna anggaran (*executive agencies*) tidak terikat dengan rincian belanja. Pada anggaran berbasis kinerja tidak dinilai berdasarkan realisasi penyerapan anggaran melainkan capaian program sebaliknya dengan pendekatan anggaran tradisional dapat menilai realisasi serapan anggaran karena keunggulan dari sistem anggaran tradisional bisa mengontrol ketat terhadap pengeluaran publik melalui spesifikasi input yang detail atau rinci.

Berdasarkan nilai TCR sistem anggaran berbasis kinerja termasuk kategori baik yang hanya menunjukkan angka 89%. Berdasarkan data tersebut penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada SKPD di Kota Padang sudah terlaksana dengan baik tetapi tidak mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran karena dari hasil pengujian secara parsial pada tabel 4.20 didapati sistem anggaran berbasis kinerja berpengaruh sebesar 4,7% terhadap tingkat penyerapan anggaran. sehingga angka yang kecil inilah yang kemungkinan menjadi penyebab sistem anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Padang.

Secara teoritis, Robinson,dkk (2005) menyatakan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran publik dengan mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai dengan penggunaan informasi kinerja secara sistematis. Dimana anggaran berbasis kinerja adalah prosedur dan mekanisme yang dilakukan untuk memperkuat kaitan antara dana yang disediakan untuk entitas sektor publik dengan *outcome* dan *output* entitas tersebut melalui penggunaan informasi kinerja formal dalam pengambilan keputusan alokasi sumberdaya. Pada penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berfokus pada hasil dari pengeluaran yang dilakukan, bukannya jumlah uang yang dikeluarkan.

Sejalan dengan Sancoko,dkk (2008) menyatakan bahwa prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara atau daerah (pengeluaran negara atau daerah) dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggung-jawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.

Senada dengan teori *stakeholder* dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi aspek perubahan paradigma manajemen pemerintah dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja pada anggaran daerah dilakukan maka dapat menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif dan efisien. Pemerintah dapat memberikan kepuasan kepada *stakeholders* sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan dana yang dikelola untuk kepentingan masyarakat umum dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem anggaran berbasis kinerja hanya berfokus kepada hasil atau output dari pengeluaran dana anggaran belanja yang telah dibuat sesuai dengan kegiatan bukan jumlah dana anggaran yang telah dikeluarkan. Sebab hasil dari pengeluaran dana yang telah dicairkan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan dana anggaran secara efektif, efisiensi dan ekonomi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu penerapan sistem anggaran berbasis kinerja tidak bisa dikaitkan dalam mencapai tingkat serapan anggaran yang di targetkan oleh pemerintah pada tahun anggaran tetapi serapan anggaran dapat dinilai dengan menggunakan pendekatan sistem anggaran tradisional namun pendekatan ini banyak menimbulkan masalah di masa akan datang. Jadi lebih baik menggunakan pendekatan sistem anggaran berbasis kinerja sebab apabila setiap satuan kerja yang melakukan pengeluaran anggaran (*spending agency*) diharuskan melakukan untuk secara eksplisit mendefinisikan *outcome* yang pelayanannya diberikan kepada masyarakat. Kemudian menyediakan indikator kinerja kunci agar dapat mengukur efektifitas dan efisiensi pelayanannya pada bagian keuangan dan pembuat keputusan kunci selama proses penyusunan anggaran sampai pencairan dana anggaran dapat terrealisasi sesuai target serapan anggaran serta mencapai hasil atau *outcome* yang diharapkan pemerintah dalam bentuk terlaksananya rencana kerja anggaran (RKA) pada periode berikutnya.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “ Pengaruh kualitas DIPA, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja ” adalah sebagai berikut:

1. Kualitas DIPA pengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran.
2. Sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran.
3. Sistem anggaran berbasis kinerja tidak pengaruh signifikan tetapi berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran.

### B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu untuk direvisi peneliti selanjutnya yaitu :

1. Indeks untuk indikator yang digunakan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam penelitian ini adalah indikator yang diadopsi oleh Shenny (2012).
2. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji  $Adjusted R^2$  adalah sebesar 0,195%. Atau hanya sebesar 19,5%. Ini berarti bahwa kontribusi variabel dependen terhadap variable independen hanya sebesar 19,5%. Sedangkan 80,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.
3. Penelitian ini hanya mengidentifikasi 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran yang dianggap peneliti berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.
4. Sampel penelitian yang digunakan terbatas hanya pada satuan kerja perangkat daerah yang memenuhi syarat dan periode tertentu.

### C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi organisasi, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran dikota padang dengan memperhatikan dalam membuat dokumen pelaksanaan anggaran atau daftar isian

pelaksanaan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem anggaran berbasis kinerja dalam sebuah SKPD.

2. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini masih terbatas pada kualitas dipa, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem anggaran berbasis kinerja untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan penyerapan anggaran seperti faktor administrasi, partisipasi anggaran, dan faktor lainnya.
3. Penelitian selanjutnya, jumlah sampel penelitian sebaiknya diperbanyak sehingga kesimpulan yang dibuat dimungkinkan untuk dapat digeneralisasi, memperluas jangkauan sampel penelitian agar tidak hanya terbatas pada satuan kerja perangkat daerah di kota padang tetapi dapat juga satuan kerja perangkat daerah di wilayah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.
- Adelstin Tamasoleng. 2015. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol.3 ,No.1, 2015: 97-110*
- Ahmad Yani, 2008, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Akadira, Tora. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Anggelina A.P Simanungkalit. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Gorontalo)*. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan

- Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
- Arens, A. Alvin. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Terjemahan oleh Hermawan Wibowo. Jakarta: Erlangga
- Astadi, dkk. 2015. Analisis Sistem Pengadaan Proyek Konstruksi Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Badung. *Jurnal Spektran Vol. 3, No. 1, Januari 2015*
- Bastian, Indra. 2006. *akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. *akuntansi sektor publik suatu pengantar, edisi ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Carlin Tasya Putri, 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu
- Decky Firmansyah Asikin. 2014. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Dewi, Komala Sartika, Dkk. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd). *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014)*.
- Edisah Putra Nainggolan, 2014. *Pengaruh Kualitas Anggaran Dan Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran*. Tesis. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Email: Ediputrafeumsu@gmail.com
- Emkhad Arif. 2012. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol 19 No. 2 Desember 2012*.
- Fuadi, Arif, 2008. Pengaruh Pengawasan Prefentif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi: Vol. 1, No. 1 (2013)*. Melalui <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/115>.
- Fauzil Mubarak. 2015. Pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian intern Akuntansi Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah kota pariaman). Skripsi. Program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas negeri padang
- Gustika Yolanda Putri. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (Spip) Terhadap Kinerja Manajerial Skpd (*Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang*) Skripsi. Program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas negeri padang.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Haryanto, Arifuddin, dan Sahmuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, J. Dodik & Wihascaryo, Adithya Bayu. 2011. *Evaluasi Penerapan Perencanaan Kas di Tingkat Satuan Kerja*. Jakarta: Sub Bagian Pengembangan Sekretariat Direktorat Jenderal perbendaharaan.
- Hendra Cipta, 2011. *Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar)*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Andalas

- Herriyanto, Hendris. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian di Wilayah Jakarta*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Hindriani, Nuning,dkk. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Perencanaan dan Penyerapan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). Program Magister Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. *Wacana – Vol. 15, No. 3 (2012)* ISSN : 1411-0199 E-ISSN : 2338-1884.
- Ismail dan Idris. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dan BLU*. Jakarta: Indeks
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kuncoro, dewi Egiastyo. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim. Kalimantan Timur: Fakultas Administrasi Bisnis. Universitas Mulawarman. *eJournal Administrasi Bisnis, 2013, 1 (4) 364-373 ISSN 0000-0000, ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id*
- Komang Sri Endrayani, dkk. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( Studi empiris Kasus Pada Dinas Kehutanan Upt Kph Bali Tengah Kota Singaraja). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Iv. Yogyakarta: Andi
- \_\_\_\_\_. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. “Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol.3, Agustus, Hal.441-456.
- Mashudi Adi Nugroho, dkk. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana Apbn Di Akhir Tahun (Studi Kasus Di Kppn Malang). *Jurnal ilmiah. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Muhrom Ali Rozai, Lilik Subagiyo. 2015. Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Boyolali). *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia Vol. 9 No. 1 Juni 2015: 72 – 89*
- Mertyani Sari Dewi, dkk. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli). *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)*.
- Moeller, Robert R., 2007. *COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body Of Knowledge*. Seventh Edition. England: John Wiley & Sons.
- Nur, Dkk. 2014. Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 12 No. 2 Des 2014*.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Palata Luru. 2011. Mekanisme Perkiraan Pencairan Dana Dan Tingkat Realisasi Anggaran Pada Kppn Poso. *Jurnal EKOMEN Vol. 11 No. 1 Januari 2011. ISSN : 1693-9131*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.  
No:164/PMK.05/2011  
tentang Petunjuk Penyusunan dan

- Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  
 \_\_\_\_\_No:257/PMK.02/2014 tentang  
 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran  
 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
 Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem  
 Pengendalian Intern Pemerintah.  
 \_\_\_\_\_No.56/2005 tentang Sistem  
 Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  
 Keuangan Daerah.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada  
 Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba  
 Empat.
- Ratna puspitasi.2013.Studi Penganggaran  
 Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Provinsi  
 Jawa Timur, Jawa Barat Dan DKI Jakarta.  
 Magister Kebijakan Publik, Departemen  
 Administrasi FISIP- UNAIR.*Jejaring  
 Administrasi Publik. Th V. Nomor 2, Juli-  
 Desember 2013*
- Robert, A. Dan Govindarajan,Vijay. 2009.*Sistem  
 Pengendalian Manajemen*. Salemba  
 Empat. Jakarta.
- Sancoko, Bambang, dkk. 2008. *Kajian terhadap  
 Penerapan Penganggaran Berbasis  
 Kinerja di Indonesia*.Departemen  
 Keuangan Republik Indonesia.
- Santi Yustini.2014 Pengaruh Karakteristik  
 Tujuan Anggaran Terhadap Tingkat  
 Penyerapan Anggaran Dengan  
 Pengawasan Internal Sebagai Variabel  
 Moderating. UinSyarif Hidayatullah  
 Jakarta. *E S E N S I Jurnal Bisnis Dan  
 Manajemen. Vol. 4, No. 2, Agustus 2014*
- Seftianova,Ratih.2013. Pengaruh Kualitas Dipa  
 Dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap  
 Kualitas Penyerapan Anggaran Pada  
 Satker Wilayah Kppn Malang.*Jrak Vol. 4  
 No.1 Februari 2013 Hal. 75 – 84.*
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for  
 Business*, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sem Paulus Silalahi.2012.Pengaruh Anggaran  
 Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi  
 Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi  
 Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap  
 Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah  
 (Studi Pemerintahan Di Kota  
 Dumai).Jurusan Akuntansi Fakultas  
 Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina  
 Widya Km 12,5 Simpang Baru,  
 Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Volume 20,  
 Nomor 3 September 2012*
- Shenny, Anggaeni.2012. *Hubungan Penyusunan  
 Anggaran Belanja Modal Dengan  
 Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja  
 Modal*. Studi pada Pemeritah  
 Kabupate/Kota Wilayah IV Priangan Jawa  
 Barat. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Siswanto, Adrianus Dwi dan Rahayu, Sri  
 Lestari. 2010. *Faktor-Faktor Penyebab  
 Rendahnya Penyerapan Belanja  
 Kementerian/Lembaga TA 2010*. Online.  
 (<http://www.fiskal.depkeu.go.id>), diakses  
 tanggal 20 September 2011.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*.  
 Bandung: Alfabeta.
- Supriyo.2015. Reviuw Pelaksanaan Anggaran  
 Semester 1 tahun 2015. Kantor wilayah  
 direktorat jenderal perbendaharaan Provinsi  
 Sumatera Barat Repebulik indonesia.
- Taufik Kurrohman.2013. Evaluasi Penganggaran  
 Berbasis Kinerja Melalui Kinerja  
 Keuangan Yang Berbasis Value For  
 Money Di Kabupaten/Kota DiJawa  
 Timur. Program Studi Akuntansi,  
 Universitas Jember, Jember, Indonesia  
 Jalan Kalimantan, No. 37, Jember,  
 68121Diterima: Mei 2012. Disetujui: Juni  
 2012. Dipublikasikan: Maret 2013. *Jurnal  
 Dinamika Akuntansi Vol. 5,  
 No.1,Maret2013,pp.1-11ISSN2085-  
 4277*.[http://journal.unnes.ac.id/nju/index.p  
 hp/jda](http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda).
- Venni Avionita.2013.”Pengaruh Implementasi  
 Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap  
 Kinerja Program Peningkatan Disiplin  
 Aparatur Instansi Pemerintah Daerah  
 (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan  
 Pembangunan Daerah Kota  
 Bandung)Skripsi.Bandung:Fakultas  
 Ekonomi Universitas Widyatama  
[www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)  
[http://dpka.padang.go.id/-LRA-SKPD-  
 SEMESTER-I-APBD-2015.rar](http://dpka.padang.go.id/-LRA-SKPD-SEMESTER-I-APBD-2015.rar) (diases  
 pada tanggal 3 desember 2016)



<https://baitussilaturrahim.wordpress.com/buku-dipa/peraturan/definisi-dipa.html>. (diases pada tanggal 25 januari 2016).  
<http://bpp.its.ac.id/bpp/perencanaan/dipa/> (diases pada tanggal 25 januari 2016)

## Lampiran

**Tabel 4.7**  
**Uji Validitas**

Variabel	Nilai Corrected Item Total Correlation
Tingkat Penyerapan Anggaran	0,221
Kualitas Dipa atau Dpa	0,376
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,374
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja	0,463

**Tabel 4.8**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha
Tingkat penyerapan anggaran	0,668
Kualitas Dipa	0,838
Sistem pengendalian internal pemerintah	0,910
Sistem anggaran berbasis kinerja	0,900

**Tabel 4.9**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	151
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean .0000000 Std. Deviation 3.29432697
Most Extreme Differences	Absolute .069 Positive .069 Negative -.047
Kolmogorov-Smirnov Z	.852
Asymp. Sig. (2-tailed)	.462

a. Test distribution is Normal.

**Tabel 4.10**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	5.536	3.168		1.747	.083		

kualitas dipa	.194	.045	.320	4.312	.000	.972	1.028
sistem pengendalian internal pemerintah	.131	.040	.320	3.245	.001	.551	1.816
sistem anggaran berbasis kinerja	.047	.058	.081	.812	.418	.545	1.833

a. Dependent Variable: tingkat penyerapan anggaran

**Tabel 4.11**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1.234	1.870		.660	.510
	kualitas dipa	.031	.027	.096	1.157	.249
	sistem pengendalian internal pemerintah	-.020	.024	-.095	-.858	.392
	sistem anggaran berbasis kinerja	.039	.034	.126	1.141	.256

a. Dependent Variable: abresid

**Tabel 4.12**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
tingkat penyerapan anggaran	151	12.00	30.00	23.3179	3.70832
kualitas dipa	151	9.00	36.00	21.0596	6.12452
sistem pengendalian internal pemerintah	151	52.00	95.00	81.9470	9.05228
sistem anggaran berbasis kinerja	151	33.00	70.00	62.3046	6.33508
Valid N (listwise)	151				

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji F Statistik**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	434.853	3	144.951	13.089	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1627.889	147	11.074		
	Total	2062.742	150			

a. Predictors: (Constant), sistem anggaran berbasis kinerja, kualitas dipa, sistem pengendalian internal pemerintah

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji F Statistik**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	434.853	3	144.951	13.089	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1627.889	147	11.074		
	Total	2062.742	150			

a. Predictors: (Constant), sistem anggaran berbasis kinerja, kualitas dipa, sistem pengendalian internal pemerintah

b. Dependent Variable: tingkat penyerapan anggaran

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Adj R Square Statistiks**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.459 <sup>a</sup>	.211	.195	3.32777

a. Predictors: (Constant), sistem anggaran berbasis kinerja, kualitas dipa, sistem pengendalian internal pemerintah

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji T Statistik**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5.536	3.168		1.747	.083
	kualitas dipa	.194	.045	.320	4.312	.000
	sistem pengendalian internal pemerintah	.131	.040	.320	3.245	.001
	sistem anggaran berbasis kinerja	.047	.058	.081	.812	.418

a. Dependent Variable: tingkat penyerapan anggaran